

EFEKTIVITAS UPTD PENGELOLAAN PASAR NEGARA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR NEGARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Fitria Lestari¹, Muhamad Arsyad², Hasbi Salim³

Proram Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: fl048407@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas UPTD Pengelolaan Pasar Negara dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) serta factor- factor yang mempengaruhinya. Latar belakang penelitian yaitu masih banyaknya PKL yang berjualan di trotoar meskipun telah ada peraturan daerah, yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan koordinasi antarorganisasi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 12 informan yang dipilih secara purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan uji kredibilitas melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban PKL di Pasar Negara telah berjalan cukup efektif, terlihat dari pelaksanaan program yang sesuai rencana, lingkungan pasar yang lebih tertib dan bersih, serta berkurangnya PKL di area terlarang. Faktor pendukung utama adalah koordinasi yang baik, sedangkan faktor penghambatnya adalah perilaku PKL yang masih memilih berjualan di trotoar. Disarankan agar UPTD dan Satpol PP meningkatkan pengawasan, sosialisasi, serta penegakan peraturan secara tegas dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas, UPTD Pengelolaan Pasar, Pedagang Kaki Lima, Ketertiban Umum.

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the State Market Management Technical Implementation Unit (UPTD) in regulating street vendors (PKL) and the factors that influence it. The background of this study is that many street vendors still sell on sidewalks despite existing regional regulations, which is caused by a lack of supervision and coordination between organizations. The study used a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation of 12 informants selected by purposive sampling. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions, with credibility testing through triangulation. The results of the study indicate that the regulation of street vendors in the State Market has been quite effective, as seen from the implementation of the program according to plan, a more orderly and clean market environment, and a reduction in street vendors in prohibited areas. The main supporting factor is good coordination, while the inhibiting factor is the behavior of street vendors who still choose to sell on the sidewalk. It is recommended that the UPTD and Satpol PP increase supervision, socialization, and enforcement of regulations firmly and continuously.

Keyword: Effectiveness, Market Management UPTD, Street Vendors, Public Order.

PENDAHULUAN

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung dengan sistem tawar-menawar. Pasar ini biasanya menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, khususnya pasar tradisional, seperti bahan pangan, sayur-mayur, buah-buahan, daging, ikan, serta barang rumah tangga. Pasar tradisional umumnya dikelola oleh pemerintah daerah atau masyarakat setempat dan memiliki ciri khas suasana yang ramai serta interaksi sosial yang erat antar pedagang dan pembeli.

Selain sebagai pusat kegiatan ekonomi, pasar tradisional juga memiliki peran sosial dan budaya yang penting dalam kehidupan masyarakat. Di pasar tradisional, terjalin hubungan kekeluargaan dan saling mengenal antara pedagang dan pembeli, sehingga tercipta rasa kebersamaan. Keberadaan pasar tradisional turut membantu perekonomian rakyat kecil serta menjaga kearifan lokal, meskipun saat ini harus bersaing dengan pasar modern yang menawarkan kenyamanan dan fasilitas lebih lengkap.

Di pasar tradisional biasanya banyak terdapat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mana Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha kecil yang menjual barang atau jasa di tempat umum seperti trotoar, pinggir jalan, alun-alun, atau area keramaian lainnya. PKL biasanya menggunakan sarana sederhana seperti gerobak, tenda, atau lapak kecil untuk berjualan. Jenis barang yang dijual sangat beragam, mulai dari makanan dan minuman, pakaian, hingga kebutuhan sehari-hari. Keberadaan PKL menjadi pilihan masyarakat karena harga yang relatif terjangkau dan lokasi yang mudah dijangkau.

Selain berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, PKL juga memiliki kontribusi penting dalam perekonomian, terutama sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. PKL membantu mengurangi angka pengangguran dan mendorong kegiatan ekonomi di tingkat lokal. Namun, di sisi lain, keberadaan PKL juga perlu diatur agar tidak mengganggu ketertiban, kebersihan, dan kelancaran lalu lintas, sehingga diperlukan kerja sama antara pemerintah dan PKL agar terciptanya lingkungan yang tertib dan nyaman.

Penataan dan pengelolaan pasar merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan ruang publik. Pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat sering kali menghadapi permasalahan kompleks, salah satunya adalah keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan tidak sesuai dengan ketentuan. Aktivitas PKL di area terlarang seperti trotoar dan bahu jalan dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, mengurangi kenyamanan pejalan kaki, serta menurunkan estetika lingkungan pasar.

Di Pasar Negara, keberadaan PKL yang masih berjualan di trotoar meskipun telah ditetapkan peraturan daerah menunjukkan bahwa penertiban belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu rendahnya kesadaran PKL terhadap peraturan, kurangnya pengawasan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan bagi UPTD Pengelolaan Pasar Negara sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penataan pasar.

UPTD Pengelolaan Pasar Negara memiliki peran penting dalam menertibkan PKL agar aktivitas perdagangan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penertiban tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan pembinaan kepada para PKL. Dengan pengelolaan yang efektif, diharapkan tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi pedagang dan ketertiban umum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas UPTD Pengelolaan Pasar Negara dalam menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kebijakan dan strategi penertiban PKL secara lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam efektivitas UPTD Pengelolaan Pasar Negara dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman proses, peran, serta interaksi antaraktor yang terlibat dalam kegiatan penertiban PKL, bukan pada pengukuran angka atau statistik.

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan informan penelitian yang meliputi pihak UPTD Pengelolaan Pasar Negara, Satpol PP, serta pedagang kaki lima. Informan menggunakan teknik purposive sampling yang berjumlah 12 orang, dianggap mampu memberikan informasi relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi, peraturan daerah, laporan kegiatan, serta arsip yang berkaitan dengan penertiban PKL.

Ada tiga acara teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pasar dan aktivitas PKL di area terlarang. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai pelaksanaan penertiban dan hambatan yang dihadapi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa foto, laporan, dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi sumber maupun teknik. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan kondisi yang sesuai dengan fakta di lapangan.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas UPTD Pengelolaan Pasar Negara dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Didalam setiap organisasi efektivitas merupakan sasaran pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, kegiatan ataupun program. Apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan maka disebut efektif.

Menurut Campbell J.P (Dyah Mutiarin & Arif Zainudin, (2021:96) pengertian efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh.

1. Keberhasilan Program

Keberhasilan program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. keberhasilan program dapat ditinjau dari proses mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan dilapangan.

a. Pelaksanaan sesuai rencana

Pelaksanaan sesuai rencana adalah kondisi ketika suatu kegiatan, program, atau kebijakan dilaksanakan tepat seperti yang telah direcanaka sebelumnya. Fasilitas yang dimiliki

Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pencapaian target sudah efektif, karena perencanaannya sudah

dijalankan sesuai dengan hasil rencana yang terdapat pada Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

b. Manfaat Program

Manfaat program adalah berbagai keuntungan atau dampak positif yang diperoleh dari pelaksanaan suatu program. Manfaat ini menunjukkan sejauh mana program memberikan nilai, membantu menyelesaikan masalah, atau meningkatkan kondisi yang menjadi tujuan program. Dijalankan wawancara yang berkaitan dengan instrumen keberhasilan program dilihat dari indikatornya.

Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan yaitu manfaat program cukup efektif karena masih memerlukan pendekatan yang lebih intensif.

2. Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran merupakan pengukuran yang efektivitasnya ditinjau dari sudut pencapaian tujuan artinya efektivitas tidak hanya mempertimbangkan sejauh mana sasaran organisasi tercapai, tetapi juga bagaimana mekanisme yang digunakan untuk mempertahankan pencapaian tersebut.

a. Pencapaian Target Sasaran

Pencapaian target sasaran adalah ukuran atau tolok ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu program, kegiatan, atau tugas berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator ini biasanya berbentuk angka, persentase, atau deskripsi kinerja yang menggambarkan hasil nyata dari pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, bisa disimpulkan bahwa pencapaian target sasaran cukup efektif, karena masih memerlukan penguatan koordinasi, sosialisasi, penataan ulang lokasi relokasi, dan pengawasan berkelanjutan agar target dapat tercapai sepenuhnya.

b. Kesesuaian Hasil dengan Tujuan

Kesesuaian hasil dengan tujuan adalah ukuran yang digunakan untuk melihat apakah hasil suatu kegiatan atau program sudah sesuai, sejalan, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal.

Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi bisa disimpulkan bahwa kesesuaian hasil dengan tujuan cukup efektif karena telah memberikan dampak positif terhadap ketertiban, kebersihan, dan keteraturan lingkungan pasar.

3. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan terhadap program yaitu efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

a. Kepuasan Terhadap Program Penertiban

Kepuasan terhadap program penertiban adalah tingkat sejauh mana peserta, penerima manfaat, atau pihak yang terlibat merasa bahwa pelaksanaan suatu program telah memenuhi kebutuhan, harapan, serta standar yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sudah efektif karena pasar menjadi lebih tertib, bersih, dan aksesnya lebih lancar.

b. Kepuasan Terhadap Pelaksana

Kepuasan terhadap pelaksana adalah tingkat penilaian atau persepsi pihak penerima layanan terhadap kemampuan, kinerja, serta profesionalitas pelaksana dalam menjalankan tugas atau program.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, cukup efektif karena masyarakat menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi terhadap kinerja pelaksana. Petugas dinilai profesional, humanis, dan mampu menjaga situasi tetap kondusif.

4. Tingkat input dan output

Tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output) jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan tidak efisien dan sebaliknya jika input lebih besar maka dapat dikatakan tidak efisien.

a. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian pedoman tertulis yang berisi langkah-langkah kerja baku untuk memastikan suatu kegiatan atau proses dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi, bisa disimpulkan bahwa standar operasional prosedur sudah efektif yang mana seluruh petugas mulai dari UPTD, Satpol PP, hingga keamanan pasar secara konsisten berpedoman pada SOP dalam setiap tahapan penertiban.

b. Pencapaian Target Program

Pencapaian target program adalah ukuran keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan, yang dinilai melalui indikator kinerja tertentu untuk melihat sejauh mana hasil yang diperoleh sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi cukup efektif, karena berkurangnya pedagang di area terlarang, terlihat lebih tertib, serta meningkatnya kelancaran aktivitas pasar

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Pencapaian tujuan menyeluruh adalah tingkat berhasilnya suatu program atau kegiatan untuk memenuhi seluruh tujuan utama yang telah ditetapkan, baik dari aspek hasil, proses, maupun dampaknya secara keseluruhan.

a. Tujuan program

Tujuan program adalah pernyataan mengenai arah dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan, yang disusun sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program agar berjalan efektif dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sudah efektif, karena pada dasarnya telah berjalan sesuai arahan yang ditetapkan. Pemerintah menargetkan terciptanya ketertiban, kebersihan, kelancaran lalu lintas, serta penataan pedagang ke lokasi resmi.

b. Dampak program bagi masyarakat adalah perubahan atau pengaruh yang muncul sebagai hasil pelaksanaan suatu program, baik dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, perubahan perilaku, peningkatan akses layanan, maupun perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, yang terjadi setelah program dijalankan untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kurang efektif, karena sebagian pedagang yang dipindahkan ke lokasi baru. mereka mengalami penurunan jumlah pembeli dan pendapatan karena lokasi yang kurang strategis.

B. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas UPTD Pengelolaan Pasar Negara dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintahan dalam melakukan sebuah peningkatan pasti mendapatkan hambatan atau kendala, yang sering muncul atau mempengaruhi keefektivasan. Berikut ini diuraikan lebih lanjut mengenai hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas UPTD Pengelolaan Pasar Negara dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di pasar Negara Kabu[paten Hulu Sungai Selatan.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yaitu segala sesuatu yang berperan sebagai kekuatan atau kondisi yang mendukung, memotivasi, dan mempercepat terjadinya suatu kegiatan, program, atau perubahan. Faktor ini berfungsi sebagai unsur yang mendukung keberhasilan suatu proses sehingga tujuan dapat dicapai secara lebih efektif dan optimal..

a. Adanya koordinasi yang baik

Adanya koordinasi yang baik sangat penting dalam proses pembuatan artikel agar hasil yang diperoleh berkualitas, sistematis, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Koordinasi ini mencakup pembagian tugas yang jelas antar pihak yang terlibat, seperti penulis, editor, dan peninjau, sehingga setiap tahapan penulisan dapat berjalan efektif dan efisien. Melalui komunikasi yang intens dan terarah, ide, data, serta referensi dapat diselaraskan sejak awal untuk menghindari kesalahan maupun pengulangan pembahasan.

Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi bisa disimpulkan bahwa efektivitas penertiban PKL di Pasar Negara sudah efektif didorong oleh pelaksanaan penertiban PKL di Pasar Negara berlangsung efektif karena ditunjang oleh koordinasi yang baik antara UPTD, Satpol PP, dan petugas keamanan. Koordinasi tersebut terlihat dari adanya komunikasi yang terarah, pembagian tugas yang jelas, serta pelaksanaan penertiban yang mengikuti jadwal dan prosedur bersama.

b. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan yaitu salah satu faktor yang penting dalam keberhasilan pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Permasalahan dukungan kebijakan sering muncul ketika regulasi yang ada belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan di lapangan, baik dari segi substansi, implementasi, maupun keberlanjutannya. Kebijakan yang kurang jelas, tumpang tindih, atau berubah sehingga dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi bisa disimpulkan bahwa indikator dukungan kebijakan sudah efektif karena, pemerintah daerah merupakan faktor penting yang memperkuat efektivitas penertiban PKL di Pasar Negara.

c. Pendekatan Humanis

Pendekatan humanis merupakan suatu cara atau strategi yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Pendekatan ini menekankan pada penghargaan terhadap nilai-nilai

kemanusiaan, empati, serta pemahaman terhadap kebutuhan, perasaan, dan potensi individu maupun kelompok. Dengan pendekatan humanis, interaksi yang terbangun lebih bersifat persuasif, partisipatif, dan dialogis, sehingga menciptakan rasa saling percaya dan keterlibatan aktif dari semua pihak.

Berdasarkan hasil dokumentasi, terlihat bahwa penertiban PKL di Pasar Negara dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan yang humanis. Dokumen berupa laporan kegiatan, dan dokumentasi foto menunjukkan bahwa petugas melakukan sosialisasi kepada pedagang sebelum penertiban, menyampaikan himbauan dengan cara yang ramah, serta mengutamakan dialog untuk mencari solusi bersama. Tidak ada tindakan represif yang ditunjukkan, melainkan pemberian pemahaman dan waktu bagi pedagang untuk menyesuaikan diri.

d. Ketersediaan Tempat

Pendekatan humanis merupakan suatu cara atau strategi yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Pendekatan ini menekankan pada penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, empati, serta pemahaman terhadap kebutuhan, perasaan, dan potensi individu maupun kelompok. Dengan pendekatan humanis, interaksi yang terbangun lebih bersifat persuasif, partisipatif, dan dialogis, sehingga menciptakan rasa saling percaya dan keterlibatan aktif dari semua pihak.

Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi bisa disimpulkan bahwa ketersediaan tempat alternatif bagi PKL menjadi faktor utama yang mendukung efektivitas penertiban di Pasar Negara. Wawancara menunjukkan bahwa pedagang lebih mudah diarahkan dan bersedia tertib ketika disediakan lokasi berjualan pengganti. Observasi di lapangan memperlihatkan bahwa pedagang yang diberikan tempat alternatif dapat tetap berjualan secara tertib, sehingga proses penertiban berjalan lancar dan minim konflik. Dokumentasi seperti peta lokasi PKL, laporan kegiatan, dan notulen rapat juga menguatkan bahwa pihak pasar menyediakan tempat pengganti sebagai bagian dari prosedur penertiban.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah bentuk segala kondisi, keadaan, atau unsur yang dapat menghalangi, memperlambat, atau mengurangi efektivitas pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau pencapaian tujuan. Faktor ini menyebabkan proses tidak berjalan optimal sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal atau tidak sesuai target.

a. Rendahnya Kesadaran Pedagang

Rendahnya kesadaran pedagang masih menjadi permasalahan yang sering dijumpai, terutama dalam hal kepatuhan terhadap aturan, kebersihan, ketertiban, dan tanggung jawab sosial. Kondisi seperti ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya pemahaman pedagang terhadap peraturan yang berlaku, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya sosialisasi dari pihak terkait. Banyak pedagang yang lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek sehingga mengabaikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, bisa disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran pedagang merupakan salah satu faktor utama yang menghambat penertiban PKL di Pasar Negara. Dari wawancara, beberapa petugas dan pengelola menyatakan bahwa pedagang belum sepenuhnya memahami pentingnya tertib

berjualan dan kepatuhan terhadap aturan. Observasi lapangan menunjukkan bahwa banyak pedagang tetap kembali berjualan di trotoar atau lokasi sebelumnya meskipun telah disediakan tempat relokasi. Dokumentasi pendukung juga memperlihatkan pola serupa, yaitu pedagang yang tidak mematuhi prosedur penertiban dan kembali ke lokasi lama. Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kesadaran dan kepatuhan pedagang menjadi langkah krusial agar penertiban dapat berjalan lebih efektif.

b. Adanya Data Sasaran yang Sering Berubah

Adanya data sasaran yang sering berubah menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program atau kegiatan. Perubahan data ini dapat disebabkan oleh dinamika kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, seperti perpindahan domisili, perubahan status pekerjaan, tingkat pendapatan, maupun kondisi usaha. Selain itu, data yang belum terintegrasi dengan baik antarinstansi serta keterbatasan sistem pembaruan data juga menyebabkan informasi sasaran menjadi kurang stabil dan tidak konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, bisa disimpulkan bahwa ketepatan dan ketersediaan data pedagang PKL menjadi faktor krusial dalam keberhasilan penertiban di Pasar Negara. Dari wawancara, petugas menyatakan bahwa data jumlah pedagang sering berubah dan tidak semua pedagang bersedia memberikan data diri yang jelas, sehingga menyulitkan pendataan. Observasi di lapangan memperlihatkan bahwa perubahan jumlah pedagang memengaruhi efektivitas penertiban. Dokumentasi pendukung juga menunjukkan adanya data yang belum akurat atau tidak lengkap, sehingga perencanaan dan pengawasan penertiban tidak berjalan optimal.

c. Prilaku Pedagang dan Masyarakat

Perilaku pedagang dan masyarakat yang sering berjualan di bahu jalan atau trotoar umumnya dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja. Pedagang memilih berjualan di lokasi tersebut karena ramai dilalui orang sehingga memudahkan mereka mendapatkan pembeli, meskipun sering melanggar aturan ketertiban umum dan mengganggu pengguna jalan atau pejalan kaki. Di sisi lain, masyarakat yang mendukung atau membeli dari pedagang tersebut biasanya karena harga yang lebih terjangkau dan kemudahan akses. Namun, perilaku ini dapat menimbulkan masalah seperti kemacetan, ketidaknyamanan, dan berkurangnya fungsi trotoar, sehingga diperlukan kesadaran bersama antara pedagang, masyarakat, dan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa indikator perilaku pedagang dan masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas penertiban PKL di Pasar Negara. Dari wawancara, pedagang menyatakan bahwa mereka cenderung kembali ke trotoar atau lokasi lama yang lebih ramai karena lebih menguntungkan. Observasi lapangan menunjukkan perilaku serupa, di mana pedagang tetap memilih lokasi strategis meskipun telah disediakan tempat relokasi. Dokumentasi pendukung juga memperlihatkan pola ini, serta menunjukkan bahwa masyarakat sebagai pembeli lebih memilih membeli di pinggir jalan, sehingga mendorong pedagang untuk tetap berjualan di lokasi lama.

d. Keterbatasan Personel

Keterbatasan jumlah personel menjadi faktor penghambat utama dalam upaya penertiban pedagang kaki lima karena jumlah petugas yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan luas wilayah serta banyaknya PKL yang harus ditertibkan. Kondisi ini menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Petugas hanya mampu melakukan penertiban pada waktu dan lokasi tertentu, sehingga setelah penertiban selesai, para pedagang kerap kembali berjualan di tempat yang sama. menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelayanan Posyandu ILP. Jumlah kader yang tidak sebanding dengan jumlah sasaran pelayanan dapat memengaruhi efektivitas dan kelancaran pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, jumlah personel UPTD Pengelolaan Pasar Negara masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan beban kerja meningkat dan penertiban menjadi kurang optimal, terutama saat jumlah sasaran pelayanan bertambah.

SIMPULAN

Dari hasil kegiatan penelitian tentang Efektivitas UPTD Pengelolaan Pasar Negara dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan , yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar subvariabel efektivitas yang telah menunjukkan capaian positif, walaupun masih ada aspek yang harus ditingkatkan. Pada subvariabel keberhasilan program, pelaksanaan penertiban telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, sehingga indikator pelaksanaan program dapat dikatakan efektif. Manfaat program penertiban juga dirasakan melalui terciptanya lingkungan pasar yang lebih tertib dan teratur, meskipun masih diperlukan pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan terhadap pedagang agar kepatuhan dapat terjaga. Subvariabel keberhasilan sasaran menunjukkan bahwa pencapaian target program penertiban sudah cukup efektif. Penertiban PKL telah memberikan dampak positif terhadap ketertiban, kebersihan, dan keteraturan lingkungan Pasar Negara. Namun demikian, keberhasilan tersebut masih membutuhkan penguatan koordinasi antarinstansi, sosialisasi yang lebih menyeluruh, penataan ulang lokasi berjualan, serta pengawasan yang berkelanjutan agar hasil yang dicapai dapat dipertahankan. Pada aspek kepuasan terhadap program, baik masyarakat maupun pedagang menilai bahwa kondisi pasar menjadi lebih tertib, bersih, dan arus lalu lintas di sekitar pasar menjadi lebih lancar. Selain itu, kepuasan terhadap pelaksana program juga tergolong cukup efektif, karena petugas dinilai profesional, humanis, dan mampu menjaga situasi tetap kondusif selama proses penertiban berlangsung. Subvariabel tingkat input dan output menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban telah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan, dimulai dari pemberitahuan, imbauan, hingga sosialisasi sebelum tindakan di lapangan dilakukan. Output program juga cukup efektif, ditandai dengan berkurangnya jumlah PKL yang berjualan di lokasi terlarang. Pada subvariabel pencapaian tujuan menyeluruh, tujuan program penertiban PKL secara umum telah tercapai sesuai dengan arahan yang ditetapkan. Namun, dari sisi dampak program bagi pedagang dan masyarakat, efektivitasnya masih tergolong kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh penurunan jumlah pembeli dan pendapatan pedagang akibat lokasi relokasi yang dinilai kurang strategis. Adapun faktor yang memengaruhi efektivitas program terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung utama adalah adanya koordinasi yang baik antara UPTD Pengelolaan Pasar Negara, Satpol PP, dan pihak keamanan. Sementara itu, faktor penghambat berasal dari perilaku pedagang yang masih memilih berjualan di trotoar karena alasan ekonomi, serta perilaku masyarakat yang cenderung berbelanja di pinggir jalan karena akses yang lebih mudah dibandingkan

dengan masuk ke dalam area pasar. Secara keseluruhan, efektivitas penertiban PKL di Pasar Negara telah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan terutama dalam aspek penataan lokasi, peningkatan daya tarik pasar, serta pendekatan ekonomi dan sosial yang lebih berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bormasa, M. F. 2022. *Kepemimpinan dan Efektivitas Kerja*. Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada
- Cardona, David. 2020. *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- CASEY MEILINDA SAPULETE, D. (2022). Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. *7787*, VIII(8.5.2017), 2003–2005.
- Hanjayani, M., Kusuma, H. E., & Nurdini, A. (2023). Fenomena Informalitas dan Kebutuhan Ruang Studi Relasi Tempat Pedagang Kaki Lima dengan Tingkat Kepuasan Konsumen. *Jurnal Koridor*, 14(1), 01–09. <https://doi.org/10.32734/koridor.v14i1.8853>
- Hapsari, K. C. (2017). Pedagang Bermotor: Karakteristik Baru Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pendidikan Tembalang, Semarang. *Jurnal Riptek, Bappeda Kota Semarang*, II(1), 57–66. <https://ripteck.semarangkota.go.id/index.php/ripteck/article/view/38>
- Kapele, C. E., Kawengian, D. D. V., & Rembang, M. (2018). Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Kembali Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar 45 Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Manado. *Diurna Komunikasi*, 7, 1–10.